

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan telah diakui sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka Administrasi Publik, pariwisata dikelola melalui serangkaian kebijakan publik yang dirumuskan untuk mengarahkan alokasi sumber daya, pengaturan perilaku, dan pencapaian tujuan pembangunan yang spesifik.

Keban (2008:4) menawarkan pandangan alternatif bahwa istilah ‘administrasi publik’ menggambarkan peran pemerintah sebagai regulator atau otoritas tunggal yang secara proaktif menginisiasi peraturan atau tindakan yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat luas, dengan asumsi bahwa masyarakat bersifat pasif, tidak mampu, dan wajib mematuhi perintah yang telah ditetapkan. Jones (dalam Winarno, 2014) menyatakan bahwa kebijakan sering disamakan dengan grand design, program, standar, tujuan, keputusan, proposal. Di sisi lain, Friederich (dalam Winarno, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diajukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu dalam suatu konteks tertentu yang menimbulkan tantangan-tantangan dan peluang-peluang bagi kebijakan yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran atau mewujudkan maksud tertentu. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dari tindakan penentuan keputusan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Sedangkan istilah publik dalam kebijakan publik mengacu pada masyarakat secara luas, yang berimplikasi bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai perwakilan rakyat untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

William Dunn (seperti dikutip oleh Winarno, 2014) mengidentifikasi beberapa tahapan kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adaption*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan pariwisata dapat dipandang sebagai hasil dari proses yang sangat kompleks yang saling terkait dengan berbagai dimensi. Kompleksitas ini timbul dari transformasi signifikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam konteks transformasi ini, kerangka kebijakan pariwisata berfungsi sebagai alat strategis bagi pemerintah untuk mempromosikan potensi pariwisatanya.. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu (Brawnwel dalam Theobald (ed), 2005: 406).

Salah satu pemangku kepentingan utama adalah pemahaman mendalam pemerintah dalam merancang dan melaksanakan perencanaan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah tentu akan memberikan perhatian khusus dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat menghasilkan manfaat

ekonomi sambil meminimalkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan (Wanhill, dalam Theobald, 2005). Di sisi lain, perusahaan yang lebih berorientasi pada keuntungan tidak dapat diatur dalam hal apa yang harus mereka lakukan, tetapi pemerintah dapat menetapkan batasan atas apa yang tidak boleh mereka lakukan melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya meliputi penetapan peraturan perencanaan ruang, izin usaha, lisensi, akreditasi, dan undang-undang.

Perkembangan industri pariwisata tanpa diragukan lagi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perkembangan industri pariwisata harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi alam dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Tantangan terkait perencanaan ruang semakin kompleks, memerlukan kewaspadaan khusus, terutama dalam konteks penggunaan dan eksploitasi ruang yang semakin intensif oleh pelaku usaha.. Industri pariwisata seharusnya dikembangkan secara berkelanjutan yang berbasis serta memperhatikan kelestarian lingkungan (Eko Noer Kristiyanto, 2017).

Sektor pariwisata merupakan instrumen strategis dalam administrasi publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 90 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) 2020-2028. Salah satu fokus utama dalam kebijakan tersebut, khususnya pada Pasal 24, adalah pengembangan kawasan wisata unggulan yang mencakup pembangunan daya tarik

wisata, aksesibilitas pariwisata, prasarana dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat hingga pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Kabupaten Kuningan sebagai daerah dengan potensi wisata alam seperti Waduk Darma memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan pariwisata tersebut tidak terlepas dari tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Pasal 24 dari Perbup No. 90 Tahun 2020 menyebutkan aspek-aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan wisata, namun evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan tersebut masih diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan yang optimal. Waduk Darma merupakan salah satu kawasan wisata unggulan yang menjadi fokus pembangunan dalam RIPPARKAB Kuningan. Sejalan dengan kebijakan pembangunan, Waduk Darma telah mengalami revitalisasi signifikan. Revitalisasi ini adalah manifestasi langsung dari upaya implementasi kebijakan pariwisata daerah. Meskipun demikian, jurnal penelitian menunjukkan adanya berbagai isu krusial pasca-revitalisasi, seperti:

1. Permasalahan kelembagaan yang tidak berjalan baik, terutama terkait tumpang tindih peraturan, kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan lemahnya sosialisasi kebijakan (Hermawaty, 2015).
2. Belum maksimalnya dampak ekonomi dari revitalisasi meskipun fasilitas telah memadai (Yusup, 2022)

3. Meski berhasil menyerap 70% tenaga kerja lokal, partisipasi masyarakat masih bersifat operasional (sebagai pekerja/pedagang) dan belum menyentuh tahap perencanaan strategis. Selain itu, manfaat ekonomi masih cenderung terpusat di Desa Jagara dan belum merata ke sembilan desa penyangga lainnya dan masih terdapat keluhan mengenai kebersihan, seperti fenomena enceng gondok yang mengurangi estetika daya tarik wisata.

Berdasarkan PERBUP Kuningan No 90 Tahun 2020 tentang “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2020-2028” tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan adalah menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan kabupaten serta indikasi program pembangunan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan di kabupaten. Strategi pengembangan kepariwisataan di kabupaten kuningan diarahkan menjadi 4 jenis, yaitu : Pariwisata alam, pariwisata buatan, desa wisata dan pariwisata sejarah.

Pemerintah Kabupaten Kuningan telah merumuskan berbagai strategi dalam pengembangan desa wisata yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2020-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023. Berikut penulis sajikan tabel perbandingan strategi dari berbagai dokumen yang telah di sebutkan

Tabel Strategi-strategi dari berbagai Dokumen Perencanaan

No	RPJPD	RIPPARKAB	RPJMD	RENSTRA
1	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam dan keunikan serta keindahan bentang alam.	Membangun daya tarik wisata (DTW) dengan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing	Mengembangkan wisata berbasis potensi lokal (desa),	Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara
2	Mengembangkan penyediaan jasa lingkungan (environmental service) khususnya pariwisata alam dan pengembangan agribisnis.	Membangun Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing	Mengembangkan kurikulum pariwisata pada pendidikan formal dan informal	Mengembangkan aksesibilitas, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata.
3	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat yang diakibatkan	Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan,	Mengembangkan desa wisata dan wisata desa	Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi

	perkembangan pariwisata daerah (Desa)	memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat		yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua produk wisata yang ada
4	Pengelolaan pariwisata alam daerah yang handal dan modern dengan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang efisien dan pelaksana yang profesional.	Pengembangan investasi di bidang pariwisata dengan penyederhanaan prosedur pelayanan pemberian izin penanaman modal bidang pariwisata	Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dan meningkatkan kualitas SDM sektor pariwisata.	Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha pariwisata dan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
5	Mendayagunakan seluruh komponen pendukung pariwisata daerah yang unggul dengan pengelolaan yang efisien dan profesional	Mengembangkan kelembagaan pengelola pariwisata di kabupaten		Meningkatkan “sadar wisata” dan sapta pesona dikalangan aparatur, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Sumber: RJPd, RIPPARKAB, RPJMD, RENSTRA Kab Kuningan, diolah oleh peneliti, (2025)

Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah Pasal 24 Perbup No. 90 Tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah kebijakan ini benar-benar mampu mendorong praktik pariwisata yang ramah lingkungan dan adil secara sosial? Tanpa evaluasi, tidak ada data empiris yang dapat membuktikan apakah sumber daya

(anggaran, tenaga kerja) yang dialokasikan sudah digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi akan memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan atau kegagalan program yang telah dijalankan.

Pariwisata berkelanjutan bukan sekadar tren, melainkan sebuah visi jangka panjang. Evaluasi kebijakan memungkinkan kita untuk menilai apakah implementasi kebijakan saat ini sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Apakah kebijakan ini menciptakan sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan, atau justru hanya solusi jangka pendek. Dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang berhasil dan yang gagal, evaluasi dapat memberikan rekomendasi strategis untuk menjamin keberlanjutan sektor pariwisata Kuningan di tahun-tahun mendatang.

Tidak ada kebijakan yang sempurna. Evaluasi berfungsi sebagai alat diagnostik untuk menemukan kesenjangan yang ada. Kesenjangan ini bisa terjadi pada tahap perumusan kebijakan (misalnya, kurangnya landasan hukum yang kuat), pada tahap implementasi (misalnya, kurangnya koordinasi antar-instansi atau partisipasi publik yang minim), atau pada tahap monitoring (misalnya, tidak adanya indikator kinerja yang jelas). Penemuan kesenjangan ini sangat vital karena menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Tanpa evaluasi, masalah-masalah ini akan terus berulang dan menghambat kemajuan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya indikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan RIPPARKAB Kuningan dalam Pasal 24 dengan kondisi nyata operasional dan pengelolaan Wisata Waduk Darma pasca-revitalisasi.
2. Terdapat temuan mengenai tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar *stakeholder* (Pemerintah Daerah, pengelola, dan masyarakat) dalam pemanfaatan dan pengelolaan Waduk Darma, yang menghambat implementasi kebijakan pariwisata terpadu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kuningan (RIPPARKAB No. 90 Tahun 2020 Pasal 24) dilaksanakan pada Wisata Waduk Darma ditinjau dari aspek perwilayahan pembangunan pariwisata, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan pengembangan investasi di bidang pariwisata?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut di Waduk Darma Kabupaten Kuningan jika di analisis melalui kriteria efektivitas, efisiensi, dan responsivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam rencana pembangunan kepariwisataan di kabupaten kuningan (RIPPARKAB No. 90 Tahun 2020 Pasal 24), dengan pada Wisata Waduk Darma.
2. Mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di Waduk Darma

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait pelayanan publik, administrasi publik, dan kebijakan publik, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur mengenai kebijakan dalam pariwisata, serta memberikan wawasan baru tentang kebijakan pariwisata dan dapat mengembangkan model atau kerangka kerja baru untuk mengevaluasi

kebijakan publik, khususnya dalam konteks rencana pembangunan kepariwisataan. Kerangka ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengevaluasi kebijakan serupa di berbagai daerah.

Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian akan memberikan masukan dan rekomendasi yang konkret kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pariwisata yang sudah ada. Rekomendasi ini akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.
- b. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada, penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pelaku pariwisata untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- c. Penelitian ini akan menjadi dokumen penting yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam merencanakan program dan proyek pariwisata di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini memberikan data dan analisis yang terukur, sehingga keputusan yang diambil akan lebih berbasis bukti.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	R. Maulidin (2021)	Evaluasi Revitalisasi Kawasan Ekowisata Waduk Darma (Studi Kasus : Revitalisasi Tahap 1)	Mengevaluasi hasil pembangunan fisik dan dampak revitalisasi tahap 1 di Waduk Darma	Deskriptif Kualitatif	Revitalisasi meningkatkan estetika namun masih memerlukan integrasi manajemen antara Pemprov dan Pemkab	Fokus pada fisik revitalisasi , bukan evaluasi kebijakan dokumen RIPPARKAB secara makro.

2	Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari, 2022	Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung	Penelitian ini mengkaji terkait dengan makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan serta strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diklasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Data yang ada akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.	Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung dapat dilakukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerapan konsep Tri Hita Karana, memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata.	Lokus penelitian ini strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. menggunakan teori
---	--	--	---	---	---	--

3	Mulyono Yalia, 2014	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemanfaatan Tik Bagi Pengembangan Kepariwisata Daerah	Tujuan dari pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik	Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research), mengambark an serta mengkaji keberadaan peran Dinas Pariwisata Daerah sebagai usaha meningkatka n kepariwisata aa n di daerah Sugiyono 2005).	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan di TIK kepariwisataan di Kabupaten Kuningan belum berlangsung efektif ditinjau dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan	Penelitian ini berfokus pada kebijakan di TIK kepariwisataan kabupaten kuningan dengan menggunakan metode deskriptp kualitatif.
4	Syakira Faidila Andri(2026)	Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Pariwisata: Studi Perbandingan Peran BUMD dan BUMDes terhadap Wisata Waduk Darma	Mengidentifikas i aktor yang seharusnya dioptimalkan (BUMD vs BUMDes) untuk mencapai tata kelola pariwisata berkelanjutan di Waduk Darma	Kualitatif dengan desain studi kasus komparatif menggunakan data sekunder dari jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian	BUMDes lebih unggul dalam memfasilitasi pengelolaan berbasis masyarakat yang inklusif, sementara BUMD sulit membangun sinergi dengan warga lokal	Fokus pada perbandingan peran lembaga (BUMD vs BUMDes) dalam kerangka <i>Good Tourism Governance</i>

5	Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D dan Alif Muhammad Ikbil, 2020	Analisis Kebijakan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Evaluasi terhadap Perda 9/2014 Tentang RPJMD Kabupaten Kuningan)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah 9/2014, khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan (RPJMD).	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kuningan, seperti pakar lingkungan hidup dan perwakilan masyarakat. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan wawasan mengenai kebijakan publik di Kabupaten Kuningan, dengan fokus khusus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan konservasi.	Menurut penelitian, alasan utama ditetapkannya Kabupaten Kuningan sebagai cagar alam adalah faktor geografis. Opini publik, yang diwakili oleh pakar lingkungan hidup dari lembaga akademis dan organisasi non-pemerintah, diperhitungkan ketika mengevaluasi implementasi kebijakan.	Lokus penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah 9/2014 yang menggunakan metode kualitatif, dan teori yang digunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis dari James Anderson
---	---	--	---	---	---	--

6	I Wayan Suardana, 2016	Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan Untuk mengetahui signifikansi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.	Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan melakukan review dari beberapa jurnal dan referensi terkait, sehingga dapat ditarik suatu simpulan yang merupakan hasil dari analisis dan sintesis. Metode analisis digunakan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali merupakan kebijakan dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi masa yang akan datang.	Lokus penelitian ini untuk mengetahui kebijakan provinsi bali dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
---	------------------------	--	--	--	--	--

7	Virgi Fathurrahman, Ina Helena Agustina, dan Riswandha Risang Aji, 2024	Partisipasi Masyarakat Desa Jagara dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat Desa Jagara dalam pengembangan objek wisata Waduk Darma.	Menggunakan Pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil analisis Menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Jagara dalam pengembangan Waduk Darma hanya terlihat pada tahap pelaksanaan sebagai pelaku usaha dan pendukung kegiatan. Namun, pada tahap perencanaan dan pengawasan, partisipasi mereka masih minim bahkan tidak terlibat.	Lokus penelitian Ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat desa jagara dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
---	---	---	---	---	---	--

8	Jarkko Saarinen and Haretsebe Manwa, 2008	Tourism as a Socio-Cultural Encounter: Host-Guest Relations in Tourism Development in Bots	Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai bidang fokus penelitian di International Tourism Research Centre (ITRC)	Metode penelitian ini merupakan tinjauan (review) literatur yang mensintesis dan menganalisis isu-isu dan kebutuhan penelitian yang ada.	Dampak pariwisata dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau tidak langsung. Dampak ini bergantung pada perbedaan budaya antara host dan tamu, serta jenis dan jumlah turis. Di Botswana, meskipun pariwisata telah menciptakan lapangan kerja dan pendapatan baru, Keuntungan sosial-budaya dan ekonomi masih dianggap relatif kecil dibandingkan dengan kerugiannya	Focus penelitian ini untuk memberikan gambaran umum International Tourism Research Centre (ITRC) dengan menggunakan metode mensintesis dan menganalisa isu-isu.
---	---	--	--	--	---	---

9	Gianna Moscardo (2008).	Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions	Tujuan utama penelitian ini adalah Menantang asumsi dasar bahwa pariwisata dapat benar-benar berkelanjutan dalam dirinya sendiri dan Mengusulkan cara pandang baru, yaitu melihat pariwisata bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai salah satu alat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.	Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis literatur	Pariwisata tidak selalu dapat berkelanjutan sendiri, tetapi dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan jika diposisikan sebagai salah satu dari banyak pilihan pembangunan daerah.	Lokus penelitian ini mengusulkan cara pandang baru terhadap pariwisata dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis literatur.
---	-------------------------	---	--	---	--	---

10	Paul Lansing & Paul De Vries, 2007.	Sustainable Tourism: Ethical Alternative or Marketing Ploy?	Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah pariwisata berkelanjutan benar-benar merupakan alternatif etis dalam pengembangan pariwisata, ataukah hanya sebuah strategi pemasaran (marketing ploy) untuk menarik wisatawan dan mengkaji sejauh mana konsep pariwisata berkelanjutan dapat diimplementasikan secara nyata	Metode penelitian yang digunakan adalah studi konseptual dan analisis literatur	Pariwisata berkelanjutan masih sering diperlakukan sebagai jargon pemasaran, bukan sebagai komitmen nyata untuk keberlanjutan. Banyak pelaku industri Menggunakan label “sustainable” untuk menarik wisatawan, tanpa benar-benar menerapkan praktik ramah lingkungan maupun etis.	lokus penelitian ini mengevaluasi apakah pariwisata berkelanjutan benar-benar merupakan alternatif etis dalam pengembangan pariwisata dengan menggunakan metode studi konseptual dan analisis literature.
----	-------------------------------------	---	---	---	---	---

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pariwisata di Waduk Darma telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun terdapat celah (gap) penelitian yang menjadi fokus utama dalam studi ini. Berikut adalah posisi penelitian ini di antara literatur yang ada:

Fokus Evaluasi Kebijakan Makro: Berbeda dengan penelitian R. Maulidin (2021) yang hanya mengevaluasi hasil pembangunan fisik dan dampak revitalisasi tahap 1, penelitian ini memposisikan diri pada evaluasi kebijakan dokumen RIPPARKAB secara makro, khususnya implementasi Pasal 24 Perbup No. 90 Tahun 2020.

Analisis Multi-Indikator Terpadu: Jika penelitian Syakira Faidila Andri (2026) berfokus pada perbandingan peran lembaga (BUMD vs BUMDes) dalam kerangka Good Tourism Governance, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mengintegrasikan kriteria evaluasi William N. Dunn dan Thomas R. Dye yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan responsivitas secara mendalam.

Konteks Kebijakan Terbaru: Sebagian besar literatur terdahulu, seperti penelitian Mulyono Yalia (2014), berfokus pada kebijakan lama atau sektor spesifik seperti Teknologi Informasi. Penelitian ini hadir untuk mengevaluasi Perbup No. 90 Tahun 2020 yang merupakan regulasi relatif baru, sehingga belum banyak studi komprehensif yang mengukur dampaknya di lapangan.

Kedalaman Partisipasi dan Responsivitas: Berbeda dengan studi Virgi dkk. (2024) yang hanya mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jagara, penelitian ini memperluas lokus analisis pada responsivitas kebijakan terhadap sembilan desa penyangga lainnya guna melihat pemerataan manfaat ekonomi secara kawasan.

Sinkronisasi Kelembagaan: Penelitian ini memberikan kebaruan dengan membedah tumpang tindih regulasi antar-pemangku kepentingan (Disporapar, pengelola, dan instansi terkait) sebagai hambatan administratif utama dalam transformasi Waduk Darma menjadi destinasi ekowisata modern.

Penelitian ini mengisi celah akademik dengan menawarkan

evaluasi kebijakan yang komprehensif dan multidimensi pada daerah berkembang (Kabupaten Kuningan), yang memiliki karakteristik unik antara fungsi konservasi air dan orientasi rekreasi modern dalam satu ekosistem kebijakan yang sama.

1.5.1 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 4) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses mengorganisir dan mengoordinasikan tenaga kerja dan sumber daya publik dengan tujuan merumuskan, melaksanakan, dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik.

Keban (2008:4) Ada pandangan alternatif yang menyatakan bahwa istilah ‘administrasi publik’ menggambarkan cara pemerintah bertindak sebagai regulator atau entitas dominan tunggal yang secara konsisten aktif dan proaktif dalam mengatur atau melaksanakan tindakan yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat luas, karena masyarakat dianggap pasif, tidak mampu, dan harus mematuhi perintah yang telah ditetapkan..

Menurut Nicholas (dalam Harbani Pasolong, 2010: 8) Administrasi Publik merupakan gabungan yang rumit antara teori dengan praktik, yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman tentang hubungan pemerintahan dengan masyarakat sipil, dan juga mendukung kebijakan publik agar lebih peka terhadap kebutuhan sosial kemasyarakatan.

Kuhn (dalam Keban, 2008: 31) mengartikan paradigma suatu perspektif, nilai, cara, prinsip dasar, atau metode untuk memecahkan sesuatu, yang pernah dianut oleh sekelompok ilmuwan pada saat masa

waktu tertentu. Sedangkan Inu Kencana Syafii (2006:26) mengartikan paradigma sebagai corak pemikiran suatu individu atau sekelompok.

Terdapat beberapa perubahan perspektif administrasi publik selama perkembangan ilmu administrasi publik. Nicholas Henry (1955: 21-49) (dalam Keban, 2008: 31-33), berpandangan bahwa di dalam administrasi publik terdapat paradigma yakni:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Dalam tulisan Frank J. Goodnow yang berjudul “Politics and Administration” pada tahun 1900 menyatakan bahwa politik harus fokus pada kebijakan atau ekspresi dari keinginan rakyat, sedangkan administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan atau keinginan tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1950-1970)

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan administrasi dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan personalia), *Directing* (pengarahkan), *Coordinating* (pengoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Prinsip-prinsip ini bersifat universal atau dapat diterapkan dimana saja, sehingga lokus dari administrasi publik tidak jelas dan tidak pernah diungkapkan secara jelas. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dapat berlaku dimana saja termasuk di

organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini lebih menekankan fokus dari pada lokus.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Editor buku “Elements of Public Administration” Morstein-Max pada tahun 1946 mengungkapkan pemisahan antara politik dan administrasi merupakan hal yang tidak masuk akal. Di samping itu, Herbert Sinom menanggapi ungkapan Morstein-Max dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip pada administrasi tidak konsisten dan prinsip tersebut tidak berlaku untuk semua situasi. Paradigma ini memiliki fokus yang tidak jelas karena tidak adanya prinsip yang membentuk administrasi publik itu sendiri, sedangkan lokus paradigma ini berada di birokrasi pemerintah.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini memiliki peran dalam memajukan ilmu administrasi publik sebagai ilmu yang independen dan berdaulat. Paradigma ini juga menunjang peningkatan kualitas dan hasil kerja para administrator publik. Akan tetapi paradigma juga menuai kritikan dari beberapa kalangan, khususnya yang meyakini bahwa administrasi publik tak lepas dari politik dan nilai-nilai.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini telah menetapkan fokus dan lokusnya secara eksplisit. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah kebijakan publik, teori organisasi, teori manajemen, yang merupakan bidang-

bidang kejian utama dalam disiplin ilmu ini, sedangkan lokunya yaitu isu-isu dan kepentingan- kepentingan publik.

6. *Governance*

Administrasi publik dalam paradigma ini mencakup proses pengorganisasian, penjelasan, perenvangan, dan pembentukan organisasi agar dapat bergerak menuju kemajuan dengan mengutamakan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang optimal serta menerapkan sistem desentralisasi dan organisasi yang responsif terhadap demokrasi serta memberikan dampak yang seimbang di masyarakat.

Berdasarkan uraian paradigma diatas, penelitian ini lebih dekat dengan paradigma lima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Sesuai dengan pemaparan paradigma kelima, paradigma ini telap menetapkan lokus dan fokusnya secara eksplisit. Fokus dalam penelitian ini ialah Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelaanjutan Di Kabupaten Kuningan dan lokusnya ialah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Paradigma ini menetapkan tiga fokus utama yaitu teori kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen publik, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji aspek kebijakan publik.

1.5.2 Kebijakan Publik

Jones (dalam Winarno, 2014) menyatakan bahwa kebijakan sering disamakan dengan grand design, program, standar, tujuan, keputusan, proposal. Di sisi lain, Friederich (dalam Winarno, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diajukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu dalam suatu konteks tertentu yang menimbulkan tantangan-tantangan dan peluang-peluang bagi kebijakan yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran atau mewujudkan maksud tertentu. Dengan demikian, kebijakn dapat dipahami sebagai hasil dari tindakan penentuan keputusan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Sedangkan istilah publik dalam kebijakan publik mengacu pada masyarakat secara luas, yang berimplikasi bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai perwakilan rakyat untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Putra (dalam Fermana, 2009) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan untuk masyarakat. Dalam menentukan keputusan pada kebijakan publik, tuntutan masyarakat diakomodasi dan didelegasikan kepada individu atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Namun, aspirasi sosial dan permintaan setiap individu dalam masyarakat tidak

sama karena perspektif individu terhadap preferensi pribadi, etika, kebebasan pribadi, hal pribadi, dan distribusi keadilan.

Mengenai hal tersebut, delegasi yang ditugaskan untuk menyampaikan harapan masyarakat seringkali menghadapi benturan kepentingan. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2019), menyatakan kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang ditentukan oleh individu atau kelompok aktor yang bertujuan menyelesaikan suatu masalah atau isu. Oleh karena itu, kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah dan berbagai kebutuhan masyarakat.

William Dunn (seperti dikutip oleh Winarno, 2014) mengidentifikasi beberapa tahapan kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adaption*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan, lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda

Masalah-masalah yang ditempatkan pada agenda publik oleh para pejabat publik yang terpilih dan terangkat harus melalui pertimbangan awal apakah layak untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan. Beberapa masalah mungkin diabaikan, beberapa menjadi pusat perhatian, dan beberapa ditangguhkan untuk jangka waktu yang lama karena berbagai alasan yang menyertainya.

2) Formulasi kebijakan

Masalah-masalah yang ditempatkan pada agenda kebijakan kemudian ditelaah dan dicarikan solusi oleh para pengambil kebijakan. Solusi-solusi tersebut berasal dari beragam opsi atau alternatif kebijakan. Perumusan kebijakan dilaksanakan dengan menentukan alternatif solusi terbaik yang disarankan oleh aktor kebijakan.

3) Adopsi kebijakan

Salah satu dari beberapa opsi kebijakan yang disarankan oleh perumus kebijakan kemudian diambil untuk diadakan dengan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen, kesepakatan antara pemimpin organisasi atau putusan pengadilan.

4) Implementasi kebijakan

Badan-badan administrasi dan agen-agen pemerintah di tingkat bawah melaksanakan keputusan kebijakan yang dipilih sebagai solusi masalah. Unit-unit administrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan menggerakkan sumber daya manusia dan finansial.

5) Evaluasi kebijakan

Tahapan evaluasi kebijakan menentukan seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Karena itu ukuran atau kriteria yang dibutuhkan untuk menilai keberhasilan kebijakan diperlukan.

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kabupaten kuningan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana jangkauan Kebijakan pariwisata berkelanjutan dapat memecahkan persoalan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan.

1.5.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Wirawan (2012) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu instrumen yang berasal dari berbagai disiplin ilmu untuk mengukur, mengkaji, dan menghakimi fenomena ilmiah yang berkaitan dengan implementasi ilmu dalam praktik profesional.

Arikunto dan Cepi (2014) berpendapat lain, ia mengemukakan bahwa evaluasi adalah aktivitas untuk menghimpun informasi mengenai fungsi sesuatu, yang kemudian informasi itu dimanfaatkan untuk menerapkan pilihan yang sesuai dalam membuat sebuah keputusan. Disisi lain Wirawan (2012) berpendapat bahwa evaluasi adalah penelitian untuk menghimpun, mengkaji, dan menampilkan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, mengevaluasinya dengan membandingkan dengan kriteria evaluasi dan hasilnya dimanfaatkan untuk membuat keputusan tentang objek evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan tingkat pencapaian objek evaluasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Wirawan (2012)

mengemukakan beberapa tujuan evaluasi, antara lain: mengetahui dampak kebijakan terhadap masyarakat; memeriksa kesesuaian antara rencana dan realisasi kebijakan; menilai kualitas program berdasarkan standar yang berlaku; mendeteksi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kebijakan; meningkatkan kompetensi staff kebijakan; mematuhi peraturan perundang-undangan; mendapatkan sertifikat akreditasi kebijakan; menghitung rasio antara biaya dan manfaat kebijakan; menentukan tindakan yang perlu diambil terkait kebijakan; menunjukkan pertanggungjawaban kebijakan; memberikan umpan balik kepada pimpinan dan staf kebijakan; dan mengembangkan konsep dan metode evaluasi.

1.5.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, menurut Dunn (2013: 610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Efektivitas berhubungan dengan apakah suatu pilihan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya suatu kegiatan. Efektivitas berkaitan dengan objektivitas teknis, selalu diukur dari satuan produk atau layanan nilai moneter.

- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berhubungan dengan banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk menciptakan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah persamaan dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara usaha dan efektivitas, dan yang terakhir umumnya diukur dari keuangan.
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh perolehan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menimbulkan adanya suatu masalah. Standar kecukupan menfokuskan pada kuatnya kaitan antara pilihan kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d. Kesamaan, yaitu apakah manfaat dan biaya disalurkan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Suatu program tertentu mungkin tidak dapat dikatakan efektif, efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai yang diharapkan.

- e. Responsivitas, yaitu apakah suatu hasil kebijakan itu memenuhi kebutuhan nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan itu dapat memenuhi preferensi, kebutuhan atau keinginan, dan nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Standar responsivitas itu penting karena analisis yang dapat memenuhi semua standar lainnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih tidak berhasil jika belum mengetahui keinginan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Misalnya program rekreasi dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.
- f. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Berdasarkan model evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn maka indikator dari evaluasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi sistem pelayanan perizinan yaitu hanya indikator evaluasi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketetapan. Karena pada indikator kesamaan yaitu mencakup manfaat dan biaya

program yang akan disalurkan kepada masyarakat. Soal manfaat sudah dibahas lebih terperinci pada indikator ketetapan sedangkan terkait biaya sudah terangkup pada indikator efisiensi. Dan pada indikator kecukupan yaitu berbicara tentang efektivitas pemenuhan kebutuhan dan hal ini juga akan dibahas lebih detail pada indikator efektivitas. Selain itu kecukupan fokusnya hanya ingin mengetahui keterkaitan pilihan kebijakan yang ingin dicapai. Jadi kedua indikator tersebut yang tidak digunakan sudah tercakup dalam empat indikator yang digunakan. Dimana setiap indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan pada hasil penelitian nanti akan menggambarkan atau menjelaskan keterkaitan program dan hasilnya, dan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah diimplementasikan.

1.5.3.2 Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye

Menurut Thomas R. Dye, evaluasi kebijakan publik adalah studi tentang konsekuensi dari kebijakan tersebut, yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan empiris. Indikator atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan mencakup lima aspek utama: efektivitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan ketepatan.

- a. Efektivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini adalah indikator paling fundamental karena langsung berfokus pada hasil akhir (outcomes) dari kebijakan, bukan sekadar kegiatan atau *output*-nya. Contoh, jika suatu kebijakan bertujuan menurunkan angka kemiskinan, efektivitasnya diukur dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan yang benar-benar terjadi.
- b. Efisiensi mengevaluasi perbandingan antara biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Sebuah kebijakan dianggap efisien jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, atau jika tujuan tercapai dengan biaya serendah mungkin.
- c. Responsivitas mengukur seberapa baik kebijakan merespons kebutuhan dan preferensi masyarakat. Indikator ini menilai apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi, tuntutan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang peka terhadap perubahan sosial dan mampu mengakomodasi masukan dari berbagai pihak.
- d. Keadilan mengevaluasi apakah manfaat dan beban dari suatu

kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Keadilan bisa dilihat dari dua perspektif: keadilan prosedural (proses pembuatan kebijakan yang adil) dan keadilan substantif (hasil kebijakan yang adil). Ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan satu kelompok tetapi juga bermanfaat bagi semua.

- e. Ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan tersebut tepat secara politis dan sosial. Indikator ini menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dan sejalan dengan nilai-nilai politik dan sosial yang berlaku. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas.

1.5.4 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata Secara umum, hal ini dianggap sebagai komponen integral dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi erat kaitannya dengan struktur ekonomi dan pertumbuhan, yang umumnya dilaksanakan melalui perencanaan pariwisata. Beberapa unsur utama yang menjadi fokus kebijakan ekonomi meliputi, di antaranya, tenaga kerja, investasi dan keuangan, industri, serta perdagangan. (Gee, 2000: 28).

Lebih lanjut Gee (2000:28) Penjelasan ini menyatakan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab yang krusial

yang harus diemban oleh pemerintah yang berencana mengembangkan atau mempertahankan sektor pariwisata sebagai komponen integral dari struktur ekonomi. Gee (1997: 286) mendefinisikan kebijakan secara lebih eksplisit sebagai rencana strategis tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur operasional. Oleh karena itu, kebijakan publik mempertimbangkan hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah serta metodologi untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang diadopsi oleh pemerintah terkait pariwisata, pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hubungan politik, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, partisipasi sektor publik sangat penting dalam proses penetapan kebijakan pariwisata.

1.5.5 Pengertian Pembangunan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pariwisata merujuk pada semua kegiatan yang terkait dengan sektor pariwisata, yang bersifat multidimensional dan multidisiplin, muncul sebagai manifestasi dari kebutuhan individu dan nasional, serta melibatkan interaksi antara wisatawan dan komunitas lokal, antara wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Pembangunan didefinisikan sebagai proses transformasi menuju kondisi yang lebih optimal, yang mencakup upaya perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian, dengan tujuan menciptakan nilai tambah sesuai dengan aspirasi yang diinginkan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata dapat dirangkum sebagai proses transformasi untuk menghasilkan nilai tambah dalam berbagai aspek sektor pariwisata, mulai dari fasilitas dan infrastruktur, atraksi wisata, hingga aspek lainnya. Tujuan pembangunan pariwisata nasional meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
2. Mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia melalui media pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan industri pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; dan
4. Mengembangkan lembaga dan tata kelola pariwisata yang dapat mensinergikan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

1.5.6 Sistem Kepariwisataan Indonesia

Pembangunan pariwisata nasional dapat dipahami sebagai

serangkaian upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata secara nasional secara berkelanjutan. Hal ini mencakup semua kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik bangsa, serta berkontribusi pada tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata nasional didasarkan pada konsep kehidupan yang seimbang dan harmonis, yaitu:

1. Hubungan manusia dan Tuhan Yang Maha Esa
2. Hubungan antar manusia dengan sesama manusia
3. Hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis.

Konsepsi tersebut jelas sejalan dengan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta dalam operasionalnya adalah bahwa pembangunan kepariwisataan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, baik sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan nasional harus bertumpu di atas semua aspek kehidupan masyarakat berupa ideology, politik, ekonomi, social budaya dan hankam sebagai struktur fundamental.

Sementara itu, kekuatan utama yang mendorong pengembangan pariwisata nasional adalah integrasi sinergis yang melibatkan unsur-unsur dari sektor bisnis, masyarakat (termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, media massa, dan tenaga kerja), serta pemerintah. Sistem pariwisata nasional didasarkan pada konsep hidup berkelanjutan di Indonesia, yang mencakup interaksi manusia dengan masyarakat dan lingkungan alam—baik sumber daya alam maupun kondisi geografis—dengan menerapkan pendekatan ketahanan nasional. Selain itu, hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan Yang Maha Kuasa menempatkan nilai-nilai agama pada tingkat tertinggi dalam pengembangan pariwisata nasional. Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika kepariwisataan nasional. Masyarakat Indonesia dengan segala hasil budayanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi titik sentral, subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan kepariwisataan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan langsung merupakan unsur kunci dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang sejati. Pariwisata nasional yang berlandaskan masyarakat sebagai fondasi utamanya juga

didasarkan pada semua aspek kehidupan masyarakat, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pariwisata memiliki kemampuan untuk mengembangkan semua aspek kehidupan nasional, dan pariwisata akan berkontribusi pada pengembangan tersebut:

- (1) Ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- (2) Ketahanan Politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan proaktif.
- (3) Ketahanan Ekonomi, yaitu kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara kemampuan stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- (4) Ketahanan Sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan social budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung

kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras,serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- (5) Ketahanan Hankam, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh insan pariwisata yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil hasilnya, mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Selain kelima aspek tersebut berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan kepariwisataan, ada tiga faktor yang sangat berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia yaitu:

Sumber Daya Alam

Telah diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan mempunyai unsur-unsur keindahan alam (natural beauty), keaslian (originality), kelangkaan (scarcity), dan keutuhan (wholeness) dan diperkaya dengan kekayaan alam berupa keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata di Indonesia.

Penduduk

Penduduk Indonesia yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang kuat serta sifat yang ramah, terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan keragaman budaya yang signifikan, yang sangat mempengaruhi upaya pembangunan nasional dan secara tidak langsung berdampak pada perkembangan pariwisata di Indonesia.

Geografi

Indonesia, sebagai negara kepulauan, terdiri dari sekitar 17.508 pulau, mencakup luas wilayah lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dengan dua pertiganya berupa perairan laut dan memiliki garis pantai lebih dari 81.000 kilometer. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis merupakan faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan bangsa dan negara. Kondisi geografis ini memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata. Melalui pengembangan pariwisata yang komprehensif dan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kondisi geografis, dapat terwujud masyarakat, bangsa, dan negara yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional..

1.5.7 Pelaku-Pelaku Utama Kepariwisataan

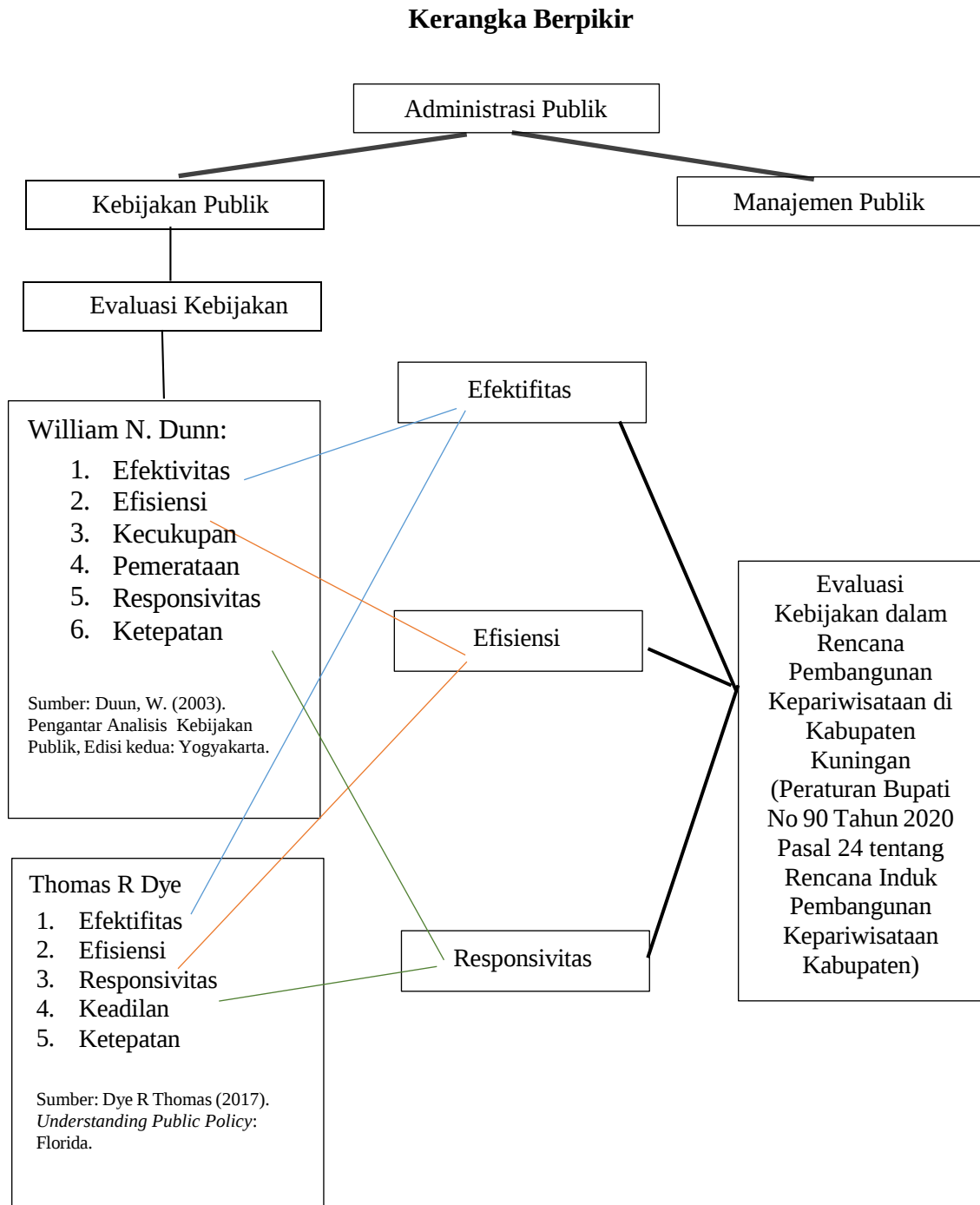
Pariwisata mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

perjalanan dan bisnis pendukung lainnya. Pada dasarnya, pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi objek wisata berupa sumber daya alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, tradisi dan seni budaya yang beragam, serta peninggalan sejarah dan arkeologi. Pengembangan objek wisata ini, jika diintegrasikan dengan pengembangan usaha pariwisata seperti layanan perjalanan, penyediaan akomodasi, dan transportasi wisata, akan meningkatkan daya tarik untuk memperluas jumlah kunjungan wisatawan dan mendukung pengembangan objek wisata baru. Hasil optimal dapat dicapai jika upaya pengembangan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan pariwisata di Indonesia dilakukan secara terintegrasi melalui koordinasi antar sektor untuk memastikan kesuksesan maksimal. Kesuksesan pembangunan ini juga bergantung pada komponen lain, seperti potensi objek wisata, akomodasi, restoran, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri souvenir. Semua elemen ini tentu melibatkan koperasi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kekuatan inti untuk mendorong pengembangan pariwisata dilakukan oleh aktor utama, yaitu dunia usaha pariwisata, masyarakat, dan pemerintah. Peran pemerintah terbatas sebagai fasilitator atau katalisator, sementara sektor swasta dan masyarakat berperan langsung dalam

kegiatan pariwisata.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasional Konsep

No	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Pelaksanaan kebijakan dalam rencana pengembangan kepariwisataan di kabupaten kuningan Peraturan bupati no 90 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pasal 24 dengan studi kasus pada Wisata Waduk Darma.	Pelaksanaan kebijakan rencana pembanguna kepariwisataan di kabupaten kuningan Peraturan bupati no 90 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pasal 24 dengan studi kasus pada Wisata Waduk Darma.	1) Perwilayahan Pembangunan Pariwisata 2) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) 3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata 4) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata 5) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata 6) Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata
2.	Faktor pendorong dan penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut di Waduk Darma Kabupaten Kuningan	Efektifitas berkaitan dengan objektivitas teknis, selalu diukur dari satuan produk atau layanan nilai moneteranya.	Efektivitas
		Efisiensi yaitu seberapa banyak jumlah usaha yang	Efisiensi

No	Konsep	Fenomena	Gejala
		dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.	
		Responsivitas responsivitas, yaitu apakah suatu hasil kebijakan itu memenuhi kebutuhan nilai kelompok-kelompok tertentu.	Responsivitas

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017 : 2). Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting, sebab ketepatan dalam memilih metode penelitian akan mengatur arah dan tujuan penelitian serta menentukan kualitas hasil penelitian.

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017:41).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang berkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2016:26).

1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Kuningan. Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Fokus penelitian tentang evaluasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yaitu melalui interaksi langsung, seperti wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Data primer mencakup pandangan, pendapat, persepsi, dan pengalaman pribadi dari para pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan.

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang memiliki pemahaman yang relevan dan mampu memberikan data serta informasi kepada peneliti mengenai fenomena yang sedang diteliti. Seleksi informan tidak hanya didasarkan pada kehadiran mereka, tetapi juga dipertimbangkan kemampuan dan relevansi terhadap masalah penelitian. Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik Purposive Sampling. Peneliti telah memilih informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini berdasarkan kredibilitas mereka yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa Jagara
3. Pengunjung Objek Wisata Waduk Darma
4. Pengelola Objek Wisata Waduk Darma

1.8.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2019). Peneliti kualitatif, sebagai *human instrument*

bertujuan menentukan fokus penelitian, penentuan informan, pengumpulan data, penilaian kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan memutuskan hasilnya (Sugiyono, 2019). Alat-alat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, handphone, alat perekam dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara

Menurut Denzim (Fadhallah, 2021) wawancara adalah percakapan face to face (tatap muka), dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang faktual terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang menjadi informan kunci merupakan kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dan penanggung jawab bagian pemanfaatan data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan peneliti akan menggunakan wawancara semi terbuka dimana peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang akan dikembangkan.

b. Observasi

Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis kegiatan serta interaksi subjek penelitian. Segala hal yang dilihat dan didengar

selama observasi dapat dicatat dan direkam dengan cermat sesuai dengan tema dan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Moleong (2005), alasan melakukan observasi dalam penelitian untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan yang rumit dan untuk membantu mengetahui perilaku manusia. Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi secara langsung Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat berupa pencarian dokumen berbentuk publikasi resmi, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hal yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti mencari dokumendokumen data dan informasi dari mana saja sepanjang dokumen tersebut berkaitan dengan topik difusi inovasi. Penelitian ini menggunakan dokumen diantaranya jurnal ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan topik difusi inovasi.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Dalam penelitian ini menggunakan data kondensasi yang mengacu pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. Yang mana dengan kondensasi ini membuat data lebih kuat. Proses Kondensasi Data Dapat disimpulkan bahwa dengan kondensasi

proses analisis data dalam penelitian kualitatif tentu akan lebih mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan di lapangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

1. Data Collection Pertama peneliti mulai mengumpulkan informasi tentang permasalahan kebijakan dalam rencana pembangunan kepariwisataan di kabupaten kuningan di berbagai laman maupun interview secara tidak langsung ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan,. Peneliti memastikan di Masyarakat Desa, Pengelola Objek Wisata dan Pengunjung Objek Wisata. Kemudian melakukan verifikasi informasi yang telah didapat dengan melakukan observasi pra lapangan.

2. Data Condensation

- a. Selecting (Pemilihan)

Menurut Miles & Huberman peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan manayang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti menentukan aspek mana yang lebih penting, hubungan mana yang bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Focusing

Miles & Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing rumusan masalah dalam penelitian evaluasi kebijakan dalam rencana pembangunan kepariwisataan di kabupaten kuningan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah dan tidak akan digunakan sebagai data penelitian disingkirkan.

c. Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul hingga ke tahap focusing dievaluasi oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan evaluasi kebijakan dalam rencana pembangunan kepariwisataan di kabupaten kuningan sudah dirasakan hasilnya dan jumlah data sudah cukup, maka data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Peneliti mengulangi proses abstraksi ini hingga tiga kali untuk memastikan bahwa tidak ada data yang tercecer atau yang keliru

dalam pemberian tanda warna sesuai focus masalah. Peneliti baru melanjutkan ke tahap berikutnya setelah peneliti merasa yakin bahwa tahap ini sudah selesai dan tidak ada data yang tercecer atau tertukar tanda warna. Setelah itu, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap simplifying dan transforming.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data yang sudah melalui beberapa tahap hingga tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Data Display

Data Display peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif, gambar, tabel, bagan, transkrip wawancara, deskripsi observasi, dan dokumentasi kegiatan penelitian terkait fokus penelitian.

4. Verifikasi atau kesimpulan

Verifikasi peneliti menyatakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh baik dari wawancara, dokumentasi maupun observasi. Dengan menggunakan kesimpulan penelitian dapat mengetahui data yang diperoleh valid atau tidak.

1.8.8 Kualitas Data

Teknik pemeriksaan kualitas data dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong Lexy (2017:330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembanding data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian evaluasi kebijakan dalam rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk mengecek keabsahan data sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang teruji. Menurut Sugiyono (2010), dalam menguji keabsahan melalui teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.
- 2) Triangulasi teknik sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data

yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Dalam penelitian ini menguji validitas data dilaksanakan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini akan mencocokkan data yang sudah diperoleh dari satu narasumber dengan narasumber lainnya dan selanjutnya akan diuraikan untuk dapat ditarik kesimpulan.